



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0243/Pdt.P/2020/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir LoloCIDI 17 Mei 1954, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Ikan, bertempat kediaman di Kampung Ujung Bulu, RT 008 RW 008, Desa Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Segeri 13 Juli 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kampung Ujung Bulu, RT 008 RW 008, Desa Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** bersama dengan **Pemohon II** disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon (calon istri), calon suami, orang tua calon suami, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 0243/Pdt.P/2020/PA.Pkj telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II hendak menikahkan Anak kandungnya, yakni:

Nama : Anak para Pemohon
Tanggal Lahir : 06 Agustus 2003 (17 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Kampung Ujung Bulu, RT 008 RW 008, Desa Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep.

dengan seorang Laki-laki bernama :

Nama : Calon suami
Umur : 31 Desember 1996 (23 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Tempat kediaman di : Kampung Ujung Bulu, Desa Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah hasil dari pernikahan seorang laki-laki yang bernama orangtua calon suami dan perempuan yang bernama orangtua calon suami ;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon I dan II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor B-341/Kua.21.15.02/PW.01/IX/2020, tanggal 24 September 2020;
4. Bahwa pernikahan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun dan sudah sering

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar bersama, sehingga para Pemohon merasa malu dan khawatir apabila tak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah;

5. Bahwa anak pemohon I dan pemohon II telah dilamar oleh calon suaminya dan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon;
6. Bahwa antara Anak pemohon dengan calon Suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan calon suami Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menjadi Istri;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak para Pemohon) untuk menikah dengan Laki-laki bernama (Calon suami);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak para Pemohon dengan calon suaminya, dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan, sehingga kepada para pihak disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia untuk menikah sebagaimana ketentuan

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan telah siap bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan rumah tangga dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon jika perkawinan dilangsungkan;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon**, di persidangan anak para Pemohon tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa keinginan anak tersebut untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami** tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak tersebut dan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran selama 2 (dua) tahun, dan sudah sering pergi keluar bersama;
- Bahwa anak tersebut berstatus sebagai gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak tersebut menyatakan telah siap menikah dan akan menjadi ibu rumah tangga dan istri yang baik;
- Bahwa antara anak tersebut dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau halangan untuk menikah kecuali usia perkawinan yang belum 19 tahun;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama **Calon suami**, di persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami tersebut saat ini berumur 23 tahun;
- Bahwa keinginan calon suami tersebut untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Anak para Pemohon** tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon suami tersebut telah menjalin hubungan pacaran selama 2 (dua) tahun dengan anak para Pemohon, dan sudah sering pergi keluar bersama;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami tersebut berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami tersebut saat ini bekerja sebagai Buruh bangunan dengan penghasilan Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa calon suami tersebut menyatakan telah siap untuk menikah dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami yang baik;
- Bahwa antara calon suami tersebut dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau halangan untuk menikah kecuali usia perkawinan anak para Pemohon yang belum 19 tahun;

Bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan orang tua dari calon suami anak para Pemohon bernama orangtua calon suami dan orangtua calon suami. Di persidangan orang tua dari calon suami anak para Pemohon tersebut telah menerangkan pada pokoknya membenarkan bahwasanya para Pemohon adalah calon mertua anaknya. Anaknya sudah berpacaran dengan anak para Pemohon selama 2 (dua) tahun dan keduanya sering pergi keluar bersama, sehingga orang tua calon suami tersebut dan para Pemohon khawatir bila tidak segera dinikahkan, anaknya dan anak para Pemohon akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan membuat malu keluarga. Orang tua dari calon suami anak para Pemohon tersebut juga menyampaikan bahwa antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda, kecuali masalah umur anak para Pemohon yang belum cukup 19 tahun, dan bahwa kedua keluarga besar sudah sepakat untuk menikahkan keduanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7310062901050128 tanggal 25 Januari 2016 a.n.Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7310-LT-02022016-0031 tanggal 02 Februari 2016, a.n Anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan (Model N7) dengan Nomor B.341/Kua.21.15.02/1/PW.01/XX/2020 tertanggal 24 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor daerah Kabupaten Pangkep, bertempat tinggal di Kampung Sappa Bungoro, Desa Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Anak para Pemohon** dengan lelaki yang bernama **Calon suami**, tetapi ditolak oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kab. Pangkep karena umur anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa saat ini anak para Pemohon berusia 17 tahun dan calon suami anak para Pemohon berusia 23 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai dan tidak ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Buruh bangunan dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 2 (dua) tahun dan sudah sering pergi bersama;
- Bahwa para Pemohon merasa khawatir bila tidak segera dinikahkan, maka anak para Pemohon dan calon suaminya bisa terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus belum menikah, sedang calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga dan sudah siap untuk melaksanakan kewajibannya sebagai istri apabila menikah nanti;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda, kecuali masalah umur anak Pemohon yang belum 19 tahun;

2. **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Ujung Bulu, Desa Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah ipar para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Anak para Pemohon** dengan lelaki yang bernama **Calon suami**, tetapi ditolak oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kab. Pangkep karena umur anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon berusia 17 tahun dan calon suami anak para Pemohon berusia 23 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Buruh bangunan dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 2 (dua) tahun dan sudah sering pergi bersama;
- Bahwa para Pemohon merasa khawatir bila tidak segera dinikahkan, maka anak para Pemohon dan calon suaminya bisa terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus belum menikah, sedang calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga dan sudah siap untuk melaksanakan kewajibannya sebagai istri apabila menikah nanti;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda, kecuali masalah umur anak Pemohon yang belum 19 tahun;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari anaknya yang bernama **Anak para Pemohon** yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama **Calon suami**, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Anak para Pemohon**, yang saat ini masih berusia 17 tahun, untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami**, umur 23 tahun, dengan alasan anak para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami atas resiko perkawinan yang akan dilakukan sekaligus dampaknya terhadap anak sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon** telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami**, rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari siapapun, serta dirinya telah mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak para Pemohon yang bernama **Calon suami** telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan **Anak para Pemohon** dan dirinya telah mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya selaku seorang suami dan kepala rumah tangga apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah menyatakan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anaknya dan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 masing-masing berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon I** dan Fotokopi Akta kelahiran atas nama **Anak para Pemohon**, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa **Anak para Pemohon** adalah anak kandung dari

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon yang lahir pada tanggal 06 Agustus 2003, saat ini berusia 17 tahun atau belum mencapai batas minimum usia perkawinan (19 tahun);

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan (Model N7) dengan Nomor B.341/Kua.21.15.02/1/PW.01/XX/2020 tertanggal 24 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karena itu, berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon** dengan **Calon suami** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Namun maksud tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon** telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun dengan seorang laki-laki yang bernama **Herianto bin Yabu**;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sudah sering pergi keluar bersama;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui sekaligus menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai Buruh bangunan dan telah memiliki penghasilan setiap bulannya, serta siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anak jika kelak menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik mereka yang hendak melangsungkan perkawinan telah cukup

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak untuk menjalankan kewajiban dan memikul tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat diajukan permohonan dispensasinya kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah terdapat keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai alasan yang bersifat “menghilangkan kemudharatan” yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut diketahui telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun, hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sudah sering pergi keluar bersama, sehingga dikhawatirkan dapat terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu pula diperhatikan secara saksama keadaan anak baik fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (*vide* Pasal 14–17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon**, belum berumur 19 tahun, akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami**, dikarenakan anak para Pemohon tersebut dipandang telah cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri. Demikian pula, dengan keadaan calon suami anak para Pemohon yang telah berumur (23 tahun) dan telah mandiri (memiliki pekerjaan dan penghasilan) mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis yang diperlukan untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri yang telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua dari masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua dari kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kelangsungan perkawinan kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat membiarkan hubungan anak para Pemohon (**Anak para Pemohon**) dengan calon suaminya (**Calon suami**) tanpa adanya status yang jelas justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar lagi bagi keduanya, yakni dengan adanya kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap norma agama, hukum dan kesusilaan, dan oleh karena itu menghentikan/menghindari kemungkinan terjadinya mudarat tersebut dipandang harus lebih didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian telah sesuai dengan kaidah usul fikih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini akan membawa tanggung jawab besar bagi orang tua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya. Artinya

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula, bahwa para orang tua calon mempelai tidak boleh sedikitpun melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik anak-anak mereka karena pengalaman sebagai orang yang lebih dahulu menjalani perkawinan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh tantangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan para Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Anak para Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami**;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1442 Hijriah, oleh **Ilyas, S.HI.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dengan dibantu oleh **Asriani AR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Ilyas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asriani AR, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	370.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).